**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BIDANG KONSUMSI DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023)**

Hanifah Tsani Astini

11211266

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

hanifahtsani2003@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh jumlah dewan direksi, independensi dewan direksi, keberagaman dewan direksi dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 47 perusahaan manufaktur bidang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 dengan sampel 32 perusahaan yang diperoleh melalui metode pengambilan sampel purposive sampling. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program spss 27. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi dan independensi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan keberagaman dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Perusahaan, Jumlah Dewan Direksi, Independensi Dewan Direksi, Keberagaman Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional.

Abstract

This study aims to analyze and provide empirical evidence of the effect of the number of boards of directors, board independence, board diversity and institutional ownership on the company's financial performance. This type of research is quantitative research. The population in this study was 47 consumer manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2023 period with a sample of 32 companies obtained through a purposive sampling method. Data processing in this study used the SPSS 27 program. The results of this study indicate that the number of boards of directors and board independence have a positive effect on financial performance, while board diversity and institutional ownership do not affect financial performance

Keywords: Company Financial Performance, Number of Boards of Directors, Board Independence, Board Diversity and Institutional Ownership.

1. Pendahuluan

Di era perkembangan bisnis yang begitu masif, perusahaan dituntut untuk terus adaptif dalam menjaga eksistensinya. Pencapaian kinerja suatu perusahaan menjadi sangat penting karena dengan pertumbuhan kinerja yang baik akan tetap menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Penilaian kinerja keuangan merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah perusahaan.

Kinerja keuangan adalah komponen dasar untuk perusahaan dalam mengukur dan mengevaluasi kegiatan operasional dan keuangan perusahaan (Agustina et al., 2015). Sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangannya (Fajri, 2022). Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai potensi perubahan sumber daya keuangan, yang dapat dikelola di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produktif aset lancar. Analisis rasio keuangan memungkinkan pengelola keuangan dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dengan cepat, karena penyajian rasio keuangan menunjukkan sehat atau tidaknya perusahaan (Fauzi, 2020).

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan. Menurut Harahap, (2013), rasio profitabilitas menggambarkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan segala sumber daya dan kemampuannya. Tingkat profitabilitas bank dapat dilihat pada *ROE (Return On Equity)* (Situmorang & Simanjuntak, 2019). *ROE (Return On Equity)* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam mencapai keuntungan yang bersih/ laba bersih.

Sejumlah kasus menimpa perusahaan BUMN sektor manufaktur bidang konsumsi. Sejumlah perusahaan BUMN tersebut di antaranya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang mencatatkan kerugian sebesar Rp 1,8 triliun pada tahun 2023. Kerugian tersebut membengkak lebih dari 10 kali lipat atau 1.345,3% dibandingkan kerugian di 2022 sebesar Rp 126 miliar. Selain itu, PT Indofarma Tbk (INAF) yang juga mencatatkan pembengkakan kerugian Rp 605 miliar pada 2023, atau naik dari tahun 2022 di Rp 428 miliar. Tata kelola Kimia Farma diduga karena perilaku koruptif. Sebab, kerugian korporasi yang karena salah tata kelola erat kaitannya dengan unsur kesengajaan. Sehingga, proses pengusutan tindak pidana korupsi perlu dilakukan untuk mengetahui aktor korupsi, modus dan kerugian keuangan. Kementerian BUMN mesti mengambil inisiatif untuk melaporkan dugaan bancakan ini. ada masalah dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran di Kimia Farma. Merujuk pada inefisiensi sejumlah lini bisnis dan produk yang diakui oleh manajemen Kimia Farma. Semisal wacana penutupan sejumlah pabrik lantaran profit tidak bisa menambal biaya operasional dan produksi. Juga, soal peningkatan nilai produksi yang terbilang masif, tetapi tidak sepadan dengan jumlah permintaan pasar. Menurut CNBN Indonesia, Indofarma juga disebut kesulitan membayar gaji karyawan mulai tahun 2024. Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Tbk inisial AP ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi membuktikan bahwa masih melemahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Akibat sejumlah persoalan dan penyimpangan tersebut, maka perlu adanya perbaikan pengawasan dan pengimplementasian *good corporate governance* secara konsisten. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance*

dalam perusahaan akan memengaruhi keberlangsungan perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan (Muryati & Suardikha, 2014). Menurut Sedarmayanti, (2012) *Good Corporate Governance* merupakan sistem, proses dan seperangkat aturan yang menyusun hubungan antar pihak yang bersangkutan, seperti hubungan antara pemegang saham dan dewan direksi untuk mencapai tujuan organisasi. *Good Corporate Governance* yang terlaksana dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga meningkat yang dapat menguntungkan pihak-pihak terlibat. Adanya *Corporate Governance* akan menciptakan perlindungan yang memadai untuk pihak yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan sehingga memberikan keyakinan atas investasi yang telah ditanamkan. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproses dengan jumlah dewan direksi, independensi dewan, keberagaman dewan dan kepemilikan institusional.

Jumlah dewan direksi menurut POJK Nomor 33 tahun 2014, merupakan komponen organisasi yang bertanggung jawab secara penuh mengenai segala kepentingan organisasi. Independensi dewan merupakan anggota dewan direksi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen dan pemegang saham, diberikan hak bebas untuk tidak ikut campur dalam hubungan bisnis lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut Darmadi, (2011) keberagaman dewan terdapat atribut non-diamati seperti pendidikan, pengalaman profesional serta karakteristik. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi-institusi keuangan seperti pemerintah, bank, perusahaan investasi serta lembaga lainnya (Sari & Priyadi, 2017).

Masih adanya malpraktek dan kegagalan perusahaan telah mendorong penelitian untuk menguji efektivitas berbagai struktur *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (Ntim, 2015). Namun hasil berbagai penelitian tersebut tidak konsisten dan memberikan hasil yang berbeda. Temuan Conyon & Peck, (1998) menunjukkan bahwa jumlah dewan perusahaan yang lebih kecil lebih baik daripada jumlah dewan perusahaan yang lebih besar. Perusahaan dalam jumlah dewan yang besar memungkinkan terjadinya masalah dalam ketidakefektifan dalam mengambil keputusan. Tetapi, hasil penelitian yg dilakukan oleh Jati, (2009) menyatakan sebaliknya, yaitu jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian Fadillah, (2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi kepemilikan institusionalnya maka semakin rendah kinerja keuangannya. Menurut Khoirunnisa & Karina, (2021) juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Tetapi, hasil penelitian dari Aluy et al., (2017) mengatakan sebaliknya, bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Kiptoo et al., (2021) mengatakan keberagaman dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa rasio profesionalisme perusahaan yang meningkat di dewan direksi berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Darmadi, 2013). Penelitian Prantama et al., (2015) menyatakan bahwa independensi dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizky Arifan, (2016) yang juga mengungkapkan bahwa independensi dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Putra &

Nuzula, (2017) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu independensi dewan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut Zabri et al., (2016) independensi dewan dalam perusahaan belum menjamin perusahaan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* yang berdampak pada kinerja keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa terhadap hasil yang beragam mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (jumlah dewan direksi, independensi dewan, keberagaman dewan dan kepemilikan institusional) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Kiptoo et al., (2021) menunjukkan hasil dimana kedua variabel (Independensi dewan dan keberagaman dewan) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tetapi jumlah dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tetapi, penelitian Fajri, (2022) mengatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena semakin meningkatnya rasio dewan direksi maka semakin meningkat pula kinerja keuangannya. Fajri, (2022) mengungkapkan juga bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan tinjauan hasil penelitian terdahulu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah *Good Corporate Governance* (jumlah dewan direksi, independensi dewan, keberagaman dewan dan kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*Return On Equity*) di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah *Good Corporate Governance* (jumlah dewan direksi, independensi dewan, keberagaman dewan dan kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Manfaat yang dapat kita temukan ketika tujuan penelitian ini tercapai dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang tata kelola perusahaan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan di sektor manufaktur. Secara khusus, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana berbagai komponen *Good Corporate Governance*. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif. Dengan adanya data empiris yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan profitabilitas, perusahaan dapat lebih termotivasi untuk memperkuat praktik *Good Corporate Governance*.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kajian Teori

1. Teori Keagenan

Menurut C.Jensen & H.Meckling, (1976), teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agen). Dalam hubungan ini, manajer diberikan kekuasaan oleh pemegang saham untuk menjalankan tugas demi kepentingan pemegang saham. Teori agensi ini menunjukkan adanya masalah yang terkait dengan perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik dan agen. Perbedaan kepentingan ini terjadi ketika pemilik ingin mendapatkan kembali modal yang lebih besar dan secepat mungkin dari

investasi mereka di perusahaan, sedangkan manajer ingin mendapatkan insentif sebanyak mungkin atas kinerja mereka dalam menjalankan perusahaan. Asimetri informasi terjadi dimana agen memiliki lebih banyak informasi perusahaan daripada principal, sehingga kondisi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan tindakan *earning manajemen*, maka dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (Sutedi, 2011). Untuk meminimalisasi asimetri informasi ini, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan ini dapat berjalan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini dapat disebut biaya agensi, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul.

Teori keagenan mengatakan bahwa sulit untuk mempercayai bahwa pihak manajemen (agen) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (principal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham. Teori keagenan ini berhubungan dengan cara tanggung jawab dari pemilik diserahkan kepada manajer dalam mengelola perusahaan. Prinsipal memasukkan modal mereka ke dalam sebuah perusahaan dan siap menanggung risiko demi keuntungan finansial. Namun, manajer (agen) cenderung mengurangi risiko dan fokus pada mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Karena itu, toleransi risiko antara agen dan prinsipal tidak sejalan, yang menyebabkan konflik agen-prinsipal. Konflik terus berkembang karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas harian agen untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai keinginan prinsipal. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mengurangi konflik kepentingan. Jika *Good Corporate Governance* berhasil meminimalkan konflik dan biaya keagenan, hasilnya adalah peningkatan profitabilitas, efisiensi, dan kepercayaan pemangku kepentingan (Hediono & Prasetyaningsih, 2019).

2. Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan, (2014) Kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan mencerminkan pencapaian suatu organisasi dalam berbagai dimensi, termasuk keuangan, pemasaran, struktur organisasi, penyaluran dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja individu ke tingkat di atas rata-rata. Salah satu metode yang dapat digunakan manajemen untuk memenuhi kewajibannya kepada pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perusahaan adalah melalui penilaian kinerja keuangan. Aspek ini berfungsi sebagai indikator utama efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya (Rizky Arifan, 2016). Evaluasi kinerja agensi dilakukan untuk menilai sejauh mana manajemen telah memenuhi rencana atau target yang ditetapkan dan untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan optimalisasi kinerja keuangan bergantung pada pelaksanaan fungsi manajemen yang tepat, yang menggarisbawahi peran penting tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui pelaporan yang komprehensif, termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan (Titania & Taqwa, 2023).

Kinerja keuangan perusahaan adalah representasi kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan laba dengan cara yang efektif dan efisien. Kinerja keuangan menjadi salah satu faktor penting bagi calon investor saat memutuskan investasi saham. Untuk sebuah perusahaan, mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu kewajiban supaya investor tetap tertarik untuk berinvestasi atau mempertahankan investasi dalam saham. Pencapaian kinerja keuangan yang baik menandakan

efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan manajemen perusahaan untuk memilih tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, efisiensi merujuk pada rasio perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran. Artinya, dengan adanya pendapatan tertentu, diharapkan pengeluaran dapat diperoleh secara maksimal (Zulkarnain & Wuri Mirawati, 2019).

3. Good Corporate Governance

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Corporate Governance* mencakup kerangka aturan yang menggambarkan hak dan tanggung jawab pemegang saham, pemilik perusahaan, kreditor, badan pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Secara teoritis, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara keseluruhan, sekaligus mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan yang dibuat oleh dewan direksi yang dapat menguntungkan kepentingan pribadi mereka. Lebih jauh, penerapan tata kelola perusahaan yang kuat diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap organisasi (Monks & Minow, 2003). Dari berbagai sudut pandang, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu operasi perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham.

Menurut Juwitasari, (2008) salah satu aspek pengawasan adalah pembentukan mekanisme tata kelola perusahaan yang solid, yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal dirancang untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham dan mencakup unsur-unsur seperti kepemilikan manajerial dan tata kelola yang dijalankan oleh dewan komisaris, khususnya terkait komposisinya. Sebaliknya, mekanisme eksternal merujuk pada pengaruh terhadap perusahaan yang berasal dari luar struktur internalnya, termasuk pasar untuk pengendalian perusahaan, kepemilikan institusional, investasi asing, dan tingkat pembiayaan utang.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006) *Good Corporate Governance* memiliki 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta keadilan dan kesetaraan. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan material kepada pemangku kepentingan. Bertujuan agar semua pihak memiliki pemahaman yang jelas terhadap aktivitas, keputusan, dan kondisi perusahaan. Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab dalam perusahaan untuk memastikan keputusan diambil secara bertanggung jawab. Memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan perusahaan dan stakeholders. Tanggung jawab berarti kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan norma yang berlaku serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap keberlanjutan. Independensi berarti pengelolaan perusahaan dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak tertentu yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif dan berimbang. Keadilan serta kesetaraan berarti perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, dan masyarakat. Untuk menciptakan keadilan dalam akses informasi dan pengambilan keputusan.

4. Jumlah dewan direksi

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan dewan direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tentang kepengurusan sesuai dengan tujuan dari perseroan tersebut. Dewan direksi memegang tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan pada kegiatan operasi dan manajemen perusahaan. Dewan direksi berpengaruh besar terhadap keefektifan atas penggunaan sumber daya perusahaan dan modal dari investor. Hubungan good corporate governance dengan dewan direksi merujuk pada sekumpulan sistem yang berpengaruh pada keputusan manajer apabila terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian yang terdapat pada fungsi dari ukuran dewan direksi (Elizabeth, 2018). Direksi terlibat langsung untuk memastikan berhasilnya penerapan good corporate governance dan peningkatan kinerja perusahaan.

Jumlah dewan direksi menurut POJK Nomor 33 tahun 2014, merupakan komponen organisasi yang bertanggung jawab secara penuh mengenai segala kepentingan organisasi. Dalam tata kelola perusahaan, akuntabilitas berkaitan dengan masalah-masalah seperti wewenang, kekuasaan, legitimasi, tanggung jawab, dan pendelegasian. Dewan direksi bertanggung jawab atas operasi perusahaan dan memiliki kekuasaan. Jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama terkait dengan akuntabilitas, responsibility dan transparansi, karena dengan jumlah yang cukup, tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif tanpa beban kerja yang berlebihan dan dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan strategis utama perusahaan disampaikan secara jelas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jumlah anggota dewan direksi yang ideal akan memungkinkan pembagian tanggung jawab yang jelas dan efektif. Setiap anggota dapat fokus pada bidang keahlian masing-masing, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan komprehensif.

5. Independensi Dewan Direksi

Independensi dewan direksi bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan terkait aktivitas perusahaan serta melaporkannya kepada dewan komisaris. Dengan menjalankan baik tugasnya maka kinerja keuangan perusahaan akan meningkat (Tumirin, 2007). Independensi dewan direksi merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan manajemen perusahaan serta mengawasinya (Fadillah, 2017). The Indonesian Institute for Corporate Governance menungkapkan independensi dewan merupakan anggota dewan yang tidak berhubungan langsung dalam kepengurusan ataupun kepemilikan saham yang bisa memengaruhinya bertindak secara independen. Independensi dewan merupakan anggota dewan direksi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen dan pemegang saham, diberikan hak bebas untuk tidak ikut campur dalam hubungan bisnis lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Independensi dewan memiliki wewenang untuk memastikan keputusan manajemen. Oleh karena itu, dewan harus independen, sebagaimana tersirat dari namanya yang merupakan aspek mendasar dari fungsinya. Independensi dewan direksi mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip independensi, karena Independensi dewan direksi memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara objektif, tanpa pengaruh dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau konflik

kepentingan. Direksi independen bebas dari hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas, pemilik perusahaan, atau pihak lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka.

6. Keberagaman Dewan Direksi

Menurut Darmadi, (2011) keberagaman dewan terdapat atribut non-diamati seperti pendidikan, pengalaman profesional serta karakteristik. Keberagaman kognitif dalam dewan direksi mengacu pada variasi dalam latar belakang pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan cara berpikir anggota dewan. Latar belakang dewan direksi yang sesuai dengan bidang perusahaan dan profesionalisme dewan direksi akan mengurangi risiko pengambilan keputusan yang bias serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang adil daripada seseorang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi dan tidak profesional sama sekali. Adanya keberagaman dewan berdampak pada kinerja perusahaan karena menghasilkan keputusan yang bervariasi (Kartikaningdyah & Putri, 2017). Keberagaman dewan direksi mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip keadilan dan kesetaraan, karena keberagaman dalam dewan direksi mencerminkan perlakuan adil terhadap semua pihak, termasuk keterwakilan kelompok tertentu seperti perempuan, individu dengan latar belakang etnis, budaya, atau keahlian yang berbeda. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada berbagai kalangan, keberagaman memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan perspektif yang lebih luas dan inklusif.

7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh berbagai entitas seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan investor institusional lainnya. Tujuan utama kepemilikan institusional adalah untuk mengawasi manajemen melalui kerangka kerja pemantauan yang kuat. Investor institusional ini mampu menerapkan pemeriksaan dan keseimbangan yang efektif pada perusahaan tempat mereka berinvestasi. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam aktivitas manajemen, investor institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan manajemen (Farahdiba & Hendrawaty, 2022). Meskipun investor institusional tidak terlibat langsung dalam manajemen, mereka memiliki wewenang untuk memengaruhi pengawasan manajerial melalui hak suara mereka. Beberapa keputusan seperti menentukan arah, memutuskan modal perusahaan, dan menambah atau mengurangi modal memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki saham dalam perusahaan, maka semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap kinerja keuangannya (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip akuntabilitas. Pemilik institusional seperti lembaga keuangan, reksadana, atau perusahaan investasi biasanya memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan dana dari pihak lain (misalnya, investor individu). Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak secara akuntabel.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Maridkha & Himmati, (2021) dengan variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan dewan direksi serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan dengan

proksi ROA dan ROE. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta telah menerbitkan laporan keuangan periode 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Penelitian Medianto et al., (2022) dengan variabel independen yaitu dewan direksi, komisaris independen dan kepemilikan institusional serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 46 perusahaan selama 7 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan direksi, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Return on Equity secara parsial. Dewan direksi, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Return on Equity secara simultan.

Penelitian Situmorang & Simanjuntak, (2019) dengan variabel independen yaitu komposisi dewan direksi, komisaris independen dan kepemilikan institusional serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Objek pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan Buku II dan III yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 29 perusahaan. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap ROE. Sedangkan secara simultan persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif.

Penelitian Kiptoo et al., (2021) dengan variabel independen yaitu komposisi dewan direksi, ukuran dewan direksi, keberagaman dewan direksi dan independensi dewan direksi serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Data dikumpulkan dari 51 perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk beroperasi di Kenya per 31 Desember 2018. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan direksi secara negatif dan signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberagaman dewan direksi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa independensi dewan direksi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Fajri, (2022) dengan variabel independen yaitu ukuran dewan direksi dan proporsi dewan komisaris independen serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara sektor keuangan yang terdaftar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia periode 2017-2019 yakni sebanyak 19 perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dan ukuran komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak yang mendelegasikan pekerjaan (prinsipal) dan pihak yang melaksanakannya (agen). Dalam konteks perusahaan, pemilik (prinsipal) menyerahkan kendali operasional kepada manajemen (agen). Dewan direksi adalah bagian penting dari perusahaan yang memiliki peran krusial dan posisi strategis. Dengan jumlah anggota yang lebih banyak, dewan direksi yang lebih besar akan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas berkat adanya koordinasi di antara para anggotanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Jika jumlah anggota dewan direksi bertambah, pengelolaan perusahaan juga akan menjadi lebih efektif, yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan dan akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan dewan direksi yang besar biasanya memiliki pengawasan yang baik, yang dapat menambah kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang hubungan ukuran jumlah dewan direksi diantaranya Medianto et al., (2022) yang mengatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan .

H1 : Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Independensi Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi didelegasikan oleh pemegang saham untuk mengawasi dan meringkas tindakan manajemen. Fama, (1980) berpendapat bahwa masalah keagenan dapat dikurangi jika dewan terdiri dari direktur independen. Peningkatan jumlah independent dewan mengarah pada keputusan yang lebih efektif sejalan dengan kepentingan perusahaan, sehingga meningkatkan kinerjanya (Rizky Arifan, 2016).

Dewan direksi independen yang lebih besar meningkatkan peran pengawasan dalam manajemen perusahaan, sehingga mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan (Pasaribu & Simatupang, 2017). Menurut C.Jensen & H.Meckling, (1976) teori agensi, antara agen dan prinsipal terdapat asimetri informasi. Peran independensi dewan sebagai penengah antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta bertugas sebagai pemberi nasihat kepada direksi diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Menurut C.Jensen & H.Meckling, (1976) independensi dewan yang tinggi akan berpengaruh pada semakin baiknya kinerja perusahaan karena semakin rendah kecenderungan konflik keagenan yang terjadi.

Penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang hubungan independensi dewan direksi diantaranya Kiptoo et al., (2021) yang mengatakan bahwa independensi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H2: Independensi dewan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.3.3 Pengaruh Keberagaman Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi yang diperluas terdiri dari individu-individu yang memiliki kualifikasi profesional yang lebih tinggi, mampu menawarkan arahan yang lebih baik

dibandingkan dengan dewan yang lebih kecil. Sumber daya yang penting mencakup berbagai keahlian dan keterampilan yang memberdayakan para manajer untuk secara efektif memenuhi peran dan kewajiban mereka (Tricker, 2015). Kehadiran dewan direksi yang profesional sangat penting, karena keterlibatan para profesional, seperti anggota asosiasi yang relevan dapat meningkatkan kualitas secara keseluruhan, sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Keberagaman dewan dalam hal keahlian, pengalaman, dan latar belakang dapat memperbaiki pengambilan keputusan strategi. Hal ini relevan dalam teori keagenan karena beragamnya pandangan dapat membantu mengurangi risiko keputusan yang hanya menguntungkan manajemen, bukan pemegang saham.

Penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang hubungan keberagaman dewan direksi diantaranya Kiptoo et al., (2021) yang mengatakan bahwa rasio direktur profesional yang besar dapat meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik.

H3: Keberagaman dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perusahaan

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

C.Jensen & H.Meckling, (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Widyati, 2013). Secara teoritis bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat control terhadap perusahaan. Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, institusi keuangan, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kehadiran kepemilikan institusional diantisipasi untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal dan mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang hubungan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan diantaranya Maridkha & Himmati, (2021) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan berdasarkan ROE.

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.4 Model Penelitian

Model Penelitian Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yakni jumlah dewan direksi, independensi dewan direksi, keberagaman dewan direksi dan kepemilikan institusional dan variabel dependen berupa kinerja keuangan perusahaan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1 : Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah area umum yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki sifat dan ciri tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur sektor bidang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang terdapat pada populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana umumnya disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor bidang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.
2. Perusahaan manufaktur sektor bidang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode 2021-2023.
3. Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam keperluan penelitian.
4. Perusahaan manufaktur sektor bidang konsumsi di Bursa Efek Indonesia yang pada periode 2021-2023 mengalami penurunan kinerja keuangan.

4.2 Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan adalah representasi kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan laba dengan cara yang efektif dan efisien. Kinerja perusahaan diukur menggunakan Return on Equity (ROE). *ROE (Return On Equity)* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam mencapai keuntungan yang bersih/ laba bersih (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Untuk mencari presentase Return on Equity (ROE), dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Ekuitas\ Pemegang\ Saham} \times 100\% \text{ (Situmorang \& Simanjuntak, 2019)}$$

Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance dengan 5 prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta keadilan dan kesetaraan. yang diwakilkan dengan:

1. Jumlah dewan direksi

Dewan Direksi merupakan seluruh anggota direksi yang memiliki tugas dalam mengambil keputusan dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota. Jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama terkait dengan akuntabilitas, responsibility dan transparansi, karena dengan jumlah yang cukup, tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif tanpa beban kerja yang berlebihan dan dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan strategis utama perusahaan disampaikan secara jelas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jumlah dewan direksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Dewan\ Direksi = \sum Anggot\ Dewan\ Direksi \text{ (Kiptoo et al., 2021)}$$

2. Independensi Dewan Direksi

Independensi dewan merupakan anggota dewan yang tidak berhubungan langsung dalam kepengurusan ataupun kepemilikan saham yang bisa memengaruhinya bertindak secara independen. Independensi dewan direksi mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip independensi, karena Independensi dewan direksi memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara objektif, tanpa pengaruh dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau konflik kepentingan. Direksi independen bebas dari hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas, pemilik perusahaan, atau pihak lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Independensi dewan direksi dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Independensi Dewan Direksi} = \frac{\sum Direksi\ Independen}{\sum Dewan\ Direksi} \text{ (Kiptoo et al., 2021)}$$

3. Keberagaman Dewan Direksi

Keberagaman dewan direksi mengacu pada variasi karakteristik, latar belakang, dan perspektif yang dimiliki oleh para anggota dewan dalam suatu organisasi. Pada penelitian ini, difokuskan pada profesionalisme direksi seperti terdapat sertifikasi serta keanggotaan dalam badan profesional atau asosiasi industry. Keberagaman dewan direksi mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip keadilan dan kesetaraan, karena keberagaman dalam dewan direksi mencerminkan perlakuan adil terhadap semua pihak, termasuk keterwakilan kelompok tertentu seperti perempuan, individu dengan latar belakang etnis, budaya, atau keahlian yang berbeda.

Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada berbagai kalangan, keberagaman memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan perspektif yang lebih luas dan inklusif. Keberagaman dewan direksi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Keberagaman Dewan Direksi} = \frac{\sum \text{Anggota yang terdaftar oleh badan profesional}}{\sum \text{Dewan Direksi}}$$

(Kiptoo et al., 2021)

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham public yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip akuntabilitas. Pemilik institusional seperti lembaga keuangan, reksadana, atau perusahaan investasi biasanya memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan dana dari pihak lain (misalnya, investor individu). Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak secara akuntabel. Kepemilikan Institusional dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{Saha beredar}}$$

(Situmorang & Simanjuntak, 2019)

4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini bertujuan untuk mengungkap beberapa informasi tentang variabel yang akan diteliti. Tipe data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (annual report) Perusahaan Manufaktur sektor konsumsi tahun 2021-2023 sumber tidak langsung (www.idx.co.id) atau website resmi dari masing-masing perusahaan sampel. Data ini diperlukan untuk menghitung setiap variabel penelitian.

4.4 Alat Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Software SPSS. SPSS digunakan sebagai alat analisis statistika dan ekonometri. Alat analisis ini bertujuan untuk menganalisis hipotesis yang telah diajukan.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami karakteristik variabel penelitian melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standarnya dalam periode pengamatan. Statistik deskriptif merubah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian hasil pengolahan tersebut (Sugiyono, 2017).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang diambil berasal dari populasi dengan distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, analisis statistik menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Keputusan mengenai normalitas diambil

berdasarkan nilai Sig. atau signifikan < 0.05 , yang menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Sig. atau signifikan > 0.05 , distribusi data dianggap normal (Situmorang & Simanjuntak, 2019).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat korelasi di antara variabel independen dalam model regresi. Kriteria umum yang digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0.1 atau VIF (Variance Inflation Factor) < 10 (Situmorang & Simanjuntak, 2019).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ada perbedaan varians residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Jika varians residual dari satu pengamatan berbeda dengan yang lain, hal ini disebut heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melihat jika variabel pengganggu memiliki varians yang sama atau tidak. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, dapat digunakan uji Glejser (Titania & Taqwa, 2023). Jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$, maka menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini (Rizky Arifan, 2016).

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat (Ghozali, 2018). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan;

Y = Kinerja Keuangan (ROE)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Jumlah Dewan Direksi

X2 = Independensi Dewan Direksi

X3 = Keberagaman Dewan Direksi

X4 = Kepemilikan Institusional

e = error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk menentukan sejauh mana kesalahan model yang sedang digunakan. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dan membandingkannya dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan (5%). Semakin kecil nilai signifikansi, semakin sedikit pula kesalahan model yang perlu dihadapi oleh peneliti. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka

semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

b. Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Penelitian ini mengaplikasikan nilai alpha sebesar 5%, sehingga jika nilai signifikansi adalah kurang dari 0,05, itu menandakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, itu berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Ghozali, 2018), koefisien determinasi berguna untuk menilai sejauh mana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat.